



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
**UNIT KERJA** : PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PUJITO KUSWORD  
2. Jabatan : AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH

**DAERAH**

3. NHK : 51001

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/105 m2 di BANTUL, HIBAH  
TANPA AKTA Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/86 m2 di KOTA BANDAR  
LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 142.500.000

1. MOTOR, HONDA LEGENDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.  
1.500.000
2. MOTOR, HONDA METIC / BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL  
SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO / METIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 54.950.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 35.988.234

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.000.000

**Sub Total** Rp. 1.534.438.234



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.534.438.234

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.